



**PROFIL
INDEKS
DEMOKRASI
INDONESIA
SUMATERA UTARA
2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**PROFIL
INDEKS
DEMOKRASI
INDONESIA
SUMATERA UTARA**

2016



Profil Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara 2016

ISBN: 978-602-331-053-1

No. Publikasi/*Publication Number*: 12520.1711

Katalog BPS/*BPS Catalogue*: 4601006.12

Ukuran Buku/*Book Size*: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman/*Number of Pages*: ix + 26 Halaman/*Pages*

Naskah/*Manuscript*:

Bidang Statistik Sosial/*Division of Social Statistics*

Gambar Kulit/*Cover Design*:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik/
Division of Integrated Data Processing and Dissemination of Statistics

Diterbitkan oleh/*Published by*:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to source

Tim Penyusun

Profil Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara 2016

Penanggung Jawab Umum/ General Director :
Dr.Syech Suhaimi,SE,M.Si

Editor dan Penanggung Jawab/ Chief Editor:
Drs.Ramlan,MM
Dadan Supriadi, S.Si,M.Si

Penulis/ Writer:
Dahril Iskandar

Desain Kover & Infografis/ Cover & Infographic Design:
Zulhamsyah, SE



Kata Pengantar

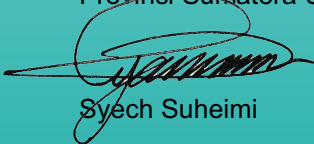
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat menerbitkan Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016.

IDI merupakan alat ukur perilaku berdemokrasi pemerintah dan masyarakat mengandalkan pada data empiris, mendasarkan pada peristiwa yang diamati dan terukur. BPS instansi yang dipercaya untuk mengumpulkan dan mengolah data dan diverifikasi bersama dengan Dewan ahli IDI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), United Nations Development Programme (UNDP).

IDI 2016 mencatat peristiwa dan perilaku berdemokrasi sepanjang 2016. Publikasi IDI Sumatera Utara 2016 mencakup data hasil penghitungan IDI 2009 s.d 2016.

Kami berharap publikasi ini dapat menjadi acuan pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perilaku yang berkarakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan untuk pencapaian nilai-nilai demokrasi.

Medan, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara



Syech Suheimi

<https://sumut.bps.go.id>



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Rangkaian Kegiatan Penyusunan IDI	viii
Landasan Konseptual	ix
Indeks Demokrasi Indonesia	1
1. Komponen Penghitung Indeks Demokrasi Indonesia	2
2. Metode Pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia	3
3. Makna Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	6
4. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2009 – 2016	7
5. Perkembangan Aspek IDI Sumatera Utara 2009 – 2016	8
6. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara	11
7. Perkembangan Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2016	13
Lampiran	17

RANGKAIAN KEGIATAN PENYUSUNAN IDI

Penyusunan laporan final

Verifikasi Tim Ahli

Indepth Study

Focus Group Discussion

Pengolahan Data

. Pengumpulan data ke BPS Pusat

. Pelaksanaan Kegiatan Koding
(Surat Kabar dan Dokumen)

Pelatihan Petugas Koding
(Surat Kabar dan Dokumen)

Penyusunan metodologi
dan instrumen kegiatan

Work Shop Interna BPS
dan Rapat Kementerian Lembaga



Landasan Konseptual

Indonesia sekarang dinilai oleh dunia sebagai sebuah negara demokrasi. Sejak dua Freedom House (2008), memasukan Indonesia kedalam kelompok negara-negara “bebas secara penuh” di dunia, didasarkan atas “indeks kebebasan”.

Indonesia adalah sebuah negara besar dengan tingkat keragaman yang besar pula, apakah itu dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tingkat ketimpangan pendapatan, penegakan hukum, konflik komunal, dan lain-lain. Karena itu, menjadi sangat relevan untuk berpikir tentang keragaman capaian demokrasi antar provinsi di Indonesia dari waktu ke waktu, dan kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor tersebut untuk pembuatan rencana pembangunan politik dan demokrasi di semua provinsi dan juga kabupaten dan kota di Indonesia.

Dalam konteks itulah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi krusial, sebagai alat ukur empirik dan sederhana untuk menilai kemajuan atau kemunduran demokrasi di provinsi-provinsi di tanah air. Untuk tujuan itu maka menjadi sangat fundamental memahami apa yang dimaksud “demokrasi” itu sendiri.

Dari pengertian atau defnisi ini, kemudian dapat diturunkan dimensi-dimensinya dan kemudian varabel-variabel dan indikator-indikatornya.

Dengan teknik pembuatan indeks dari indikator-indikator itu akan terbentuk IDI yang dapat diturunkan hingga tingkat provinsi di tanah air

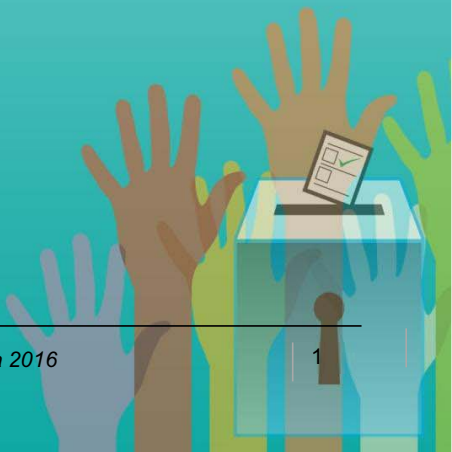
<https://sumut.bps.go.id>



Indeks Demokrasi Indonesia

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi sehingga mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga komponen yang lain tidak diperhatikan. Untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, disusunlah sebuah indikator yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang berupa kumpulan angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek demokrasi yakni kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (institusi demokratis). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator.

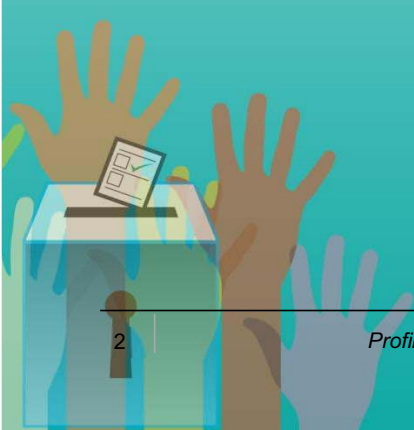
Dengan disusunnya indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi berdasarkan ketiga aspek yang dipelajari. Disamping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.



1. Komponen Penghitung IDI

Dengan mempertimbangkan dimensi teoritis dan empiris tentang demokrasi, maka pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), disepakati ada 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Institusi Demokrasi (Institusi demokrasis). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut (*civil liberties dan political rightss*) tidak mungkin dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya wadah, struktur dan prosedur pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi (institusi demokrasis) juga harus diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, maka dalam penyusunan IDI, institusi demokrasi, telah didudukkan sebagai aspek ketiga.

Adapun secara lengkap Aspek, Variabel dan Indikator dari Penyusunan IDI ditampilkan pada tabel 1.



Tabel 1. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2017

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

2. Metode Pengumpulan data IDI

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia secara keseluruhan mencakup dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data makro yang dikumpulkan melalui kegiatan analisis berita surat kabar dan analisis dokumen kebijakan dengan menggunakan instrumen terstruktur berupa kuesioner. Analisis berita surat kabar dilakukan terhadap muatan surat kabar terpilih di ibu kota provinsi. Analisis dokumen kebijakan publik dilakukan terhadap peraturan daerah (perda), surat-surat keputusan, surat edaran dan peraturan-peraturan daerah lainnya.

Pengumpulan data kualitatif dalam kegiatan ini dilakukan melalui penggalian informasi baik yang bersifat *exploratory* maupun *explanatory* melalui *focus group discussion* dan wawancara mendalam menggunakan dua metode, yaitu:

- a. *Focus Group Discussion* dilaksanakan untuk memverifikasi, baik secara *explanatory* maupun *exploratory*, hasil-hasil atau temuan dari analisis surat kabar maupun analisis dokumen.
- b. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali keterangan yang lebih mendalam dari sumber-sumber terpercaya guna lebih meyakinkan hasil dari Focus Group Discussion.

Berbeda dengan pelaksanaan wawancara yang biasa dilakukan pada kegiatan survei, pelaksanaan wawancara mendalam dalam rangka pengumpulan data kualitatif dilakukan tanpa menggunakan kuesioner. Instrumen yang disertakan dalam wawancara mendalam atau FGD hanya berupa *hand-out* yang berisi daftar variabel yang akan diteliti.

Diagram 1. Metoda Pengumpulan data IDI



3. Makna Nilai IDI

Indeks Demokrasi Indonesia memiliki rentang nilai dari 0 - 100, dimana semakin mendekati angka 100 tingkat pelaksanaan demokrasi semakin baik.

Indeks	Makna
< 60	KINERJA DEMOKRASI RENDAH
60 – 80	KINERJA DEMOKRASI SEDANG
> 80	KINERJA DEMOKRASI TINGGI

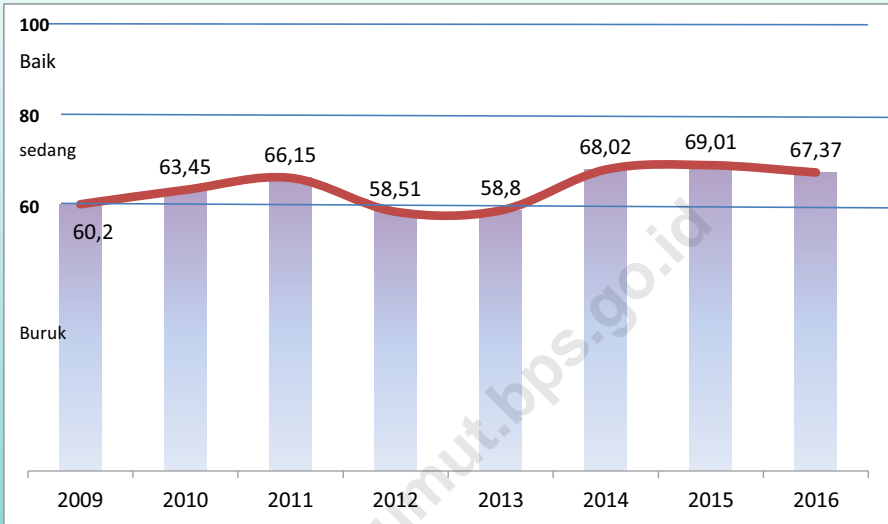
4. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2009 - 2016

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara tahun 2016 mencapai 67,37 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 69,01. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di Sumatera Utara tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 60,20. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2015 sebesar 69,01; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 67,37 di tahun 2016.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Grafik 1. Perkembangan IDI Sumatera Utara, 2009-2016

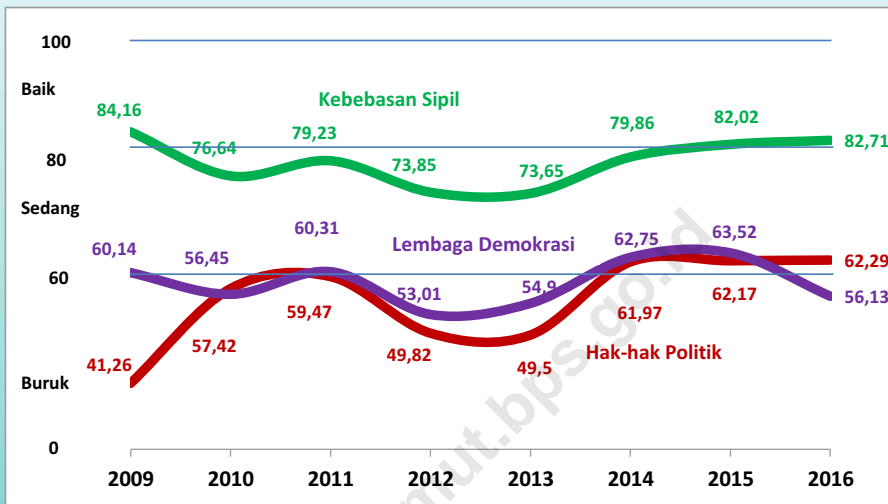


Bila dibandingkan dengan angka nasional, angka IDI Sumut masih jauh dibawah, IDI nasional mencapai 70,09. Sedangkan jika dibandingkan dengan antar provinsi IDI terendah ada di Prov. Sumatera Barat sebesar 54,41 tertinggi ada di Prov. D.I Yogyakarta sebesar 85,32

5. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara 2009 - 2016

Angka IDI Sumatera Utara 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek Kebebasan Sipil dengan rata-rata 82,71; aspek Hak-Hak Politik sebesar 62,29; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 56,13.

Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara, 2009-2015



Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2016 ada terdapat indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Lembaga Demokrasi kembali mengalami penurunan, padahal selama dua tahun terakhir yaitu 2014 dan 2015 sudah mengalami peningkatan, berada pada katagori sedang. Penurunan Aspek Lembaga Demokrasi ini bila dilihat dari variabel yang menyusunnya, pertama terjadi pada Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah turun sebesar 11,74 poin dari 37,91 pada 2015 menjadi 26,17 pada 2016. Dan ke dua terjadi pada variabel Peran Peradilan yang independen turun sebesar 25 poin, dari 75,00 pada 2015 menjadi 50,00 pada 2016.

Dua variabel lain pada Aspek Lembaga Demokrasi ini memang mengalami peningkatan yang kecil. Variabel Peran DPRD mengalami peningkatan 2.74 poin dari 19, 11 pada 2015 menjadi 21,85 pada 2016. Dan variabel Peran Partai Politik mengalami peningkatan 2.08 poin. Peningkatan

yang terjadi pada ke dua variabel ini tidak mampu untuk menutupi turunnya nilai pada Aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi Sumatera Utara.

Aspek Kebebasan Sipil tahun 2016 meningkat kecil sekali sebesar 0,69 tahun 2017 sebesar 82,71 naik pelan dari 2016 sebesar 82,02. Dari empat variabel yang menyusun Aspek Kebebasan Sipil ini dua variabel mengalami kenaikan dan dua lainnya mengalami penurunan. Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat mengalami peningkatan sebesar 11,72 poin dari 88,28 pada 2015 menjadi 100 pada 2016. Variabel Kebebasan Berpendapat mengalami peningkatan sebesar 13,89 poin dari 72,23 pada 2015 menjadi 86,12 pada 2016

Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013 termasuk pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, aspek ini menembus kategori “sedang” sampai pada IDI 2016 aspek Hak-hak Politik tetap pada pada kategori “sedang”.

Nilai indeks aspek hak-hak politik pada tahun 2016 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 62,17 menjadi 62,29 atau meningkat sebesar 0,12 poin meskipun nilai tersebut sudah masuk pada katagori sedang, masih merupakan nilai sedang terendah, artinya masih memungkinkan untuk di tingkatkan. Rendahnya nilai aspek hak-hak politik di Sumatera Utara ini terutama disebabkan oleh masih banyaknya peristiwa demonstrasi yang bersifat kekerasan atau anarkis yang terjadi selama tahun 2016

Nilai aspek lembaga demokrasi selama tahun 2016 berada pada katagori buruk dan mengalami penurunan sebesar 7,39 poin yaitu dari 63,52 pada tahun 2015 menjadi 56,13 pada tahun 2016.

Penurunan aspek lembaga demokrasi ini dipicu oleh turunnya 2 variabel pada aspek ini, yaitu pertama pada variabel Peran Peradilan yang Independen sebesar 25 poin pada tahun 2015 sebesar 75,00 menjadi 50,00 pada tahun 2016, dan kedua pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah turun sebanyak 11,74 poin dari 37,91 pada tahun 2015 menjadi 26,17 pada tahun 2016

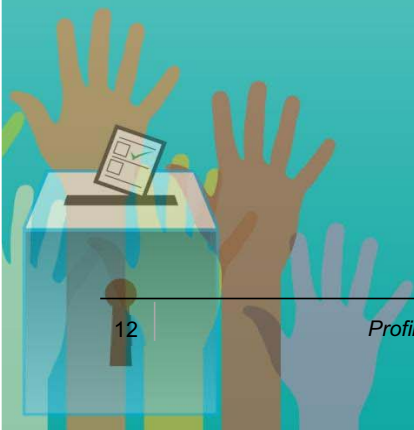
6. Perkembangan Indeks Variabel IDI

Pada tahun 2016 terdapat lima variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan. Dari lima variabel yang mengalami penurunan, tiga di antaranya menurun cukup tajam. Variabel Peran Peradilan yang Independen menurun paling tajam yaitu sebesar 25,00 poin, dari 75,00 pada 2015 menjadi 50,00 pada 2016. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang turun 11,74 poin, dari 37,91 pada 2015 menjadi 26,17 pada 2016. Penurunan terbesar ketiga terjadi pada variabel Kebebasan dari Diskriminasi yang turun 6,45 poin, dari 93,38 pada 2015 menjadi 86,93 pada 2016.

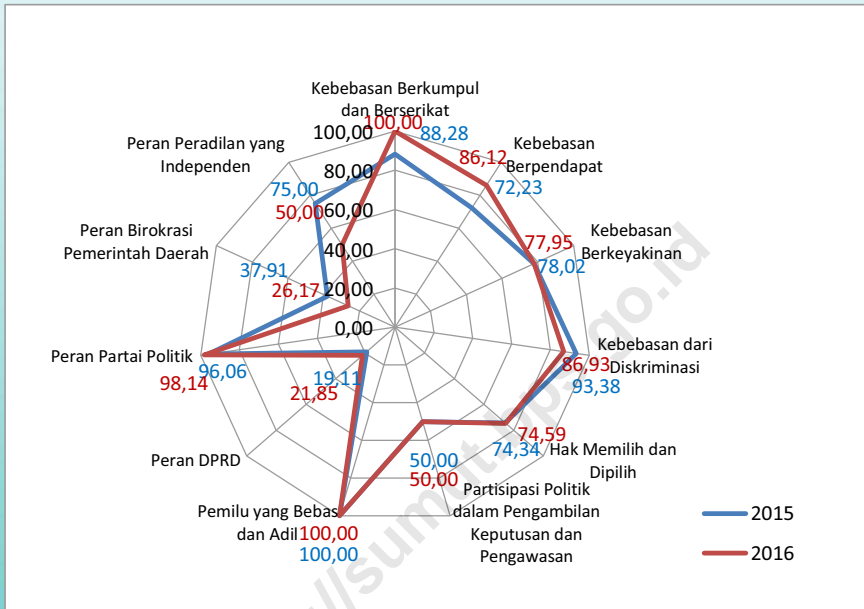
Di sisi lain, variabel Kebebasan Berpendapat meningkat secara bermakna sebesar 13,89 poin, dari 72,23 pada 2015 menjadi 86,12 pada 2016. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Variabel ini meningkat sebesar 11,72 poin dari 88,8 pada 2015 menjadi 100 pada 2016. Untuk variabel Peran DPRD dan Peran Partai Politik juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,74 poin (dari 19,11 pada 2015 menjadi 21,85 pada 2016) dan 2,08 poin

(dari 96,06 pada 2015 menjadi 98,14 pada 2016). Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3.

<https://sumut.bps.go.id>



Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara, 2015-2016



Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara, 2015-2016

7. Perkembangan Skor Indikator IDI

Pada IDI Sumatera Utara 2016, dari 28 indikator terdapat 14 indikator yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi:

- Indikator 1, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
- Indikator 2, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
- Indikator 3, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,

- d. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
- e. Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama,
- f. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok,
- g. Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok,
- h. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat,
- i. Indikator 17, Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan,
- j. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu,
- k. Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara,
- l. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu,
- m. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik,
- n. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial, dan

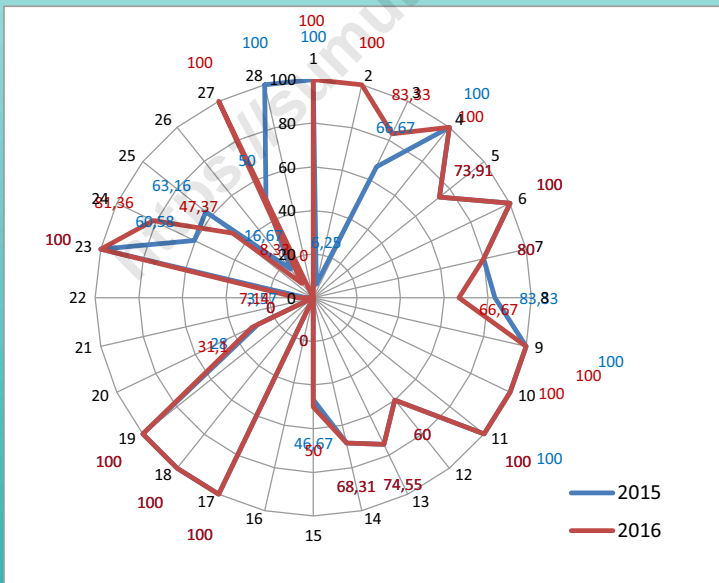
Meskipun demikian, masih terdapat juga kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2016. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 15, Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi,
- b. Indikator 16, Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan,
- c. Indikator 20, Besaran Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan,
- d. Indikator 21, Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD,
- e. Indikator 22, Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif,

- f. Indikator 25, Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN,
- g. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah, dan
- h. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi.

Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

Grafik 4. Nilai Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2015 - 2016



<https://sumut.bps.go.id>



<https://sumut.bps.go.id>

LAMPIRAN



<https://sumut.bps.go.id>



Tabel 1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara, 2009-2016

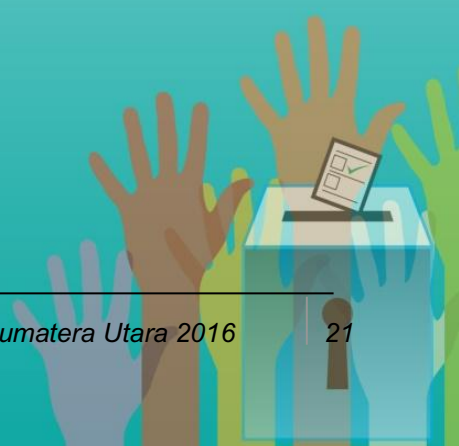
No	Nama Variabel	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100	98.75	96.88	53.13	96.88	100.00	88,28	100,00
2	Kebebasan Berpendapat	55.55	13.88	69.42	41.65	69.42	55.53	72,23	86,12
3	Kebebasan Berkeyakinan	86.43	86.43	77.95	77.95	65.55	77.95	78,02	77,95
4	Kebebasan dari Diskriminasi	84.15	86.93	79.98	83.63	86.93	86.93	93,38	86,93
5	Hak Memilih dan Dipilih	49.37	49.32	49.37	49.64	49.64	73.95	74,34	74,59
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	33.15	65.51	69.57	50.00	49.36	50.00	50,00	50,00
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	25.43	25.43	25.43	25.43	25.43	100.00	100,00	100,00
8	Peran DPRD	49.31	30.66	33.10	24.13	21.62	28.94	19,11	21,85
9	Peran Partai Politik	15.81	14.70	31.85	32.58	15.87	82.78	96,06	98,14
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	100.00	37,91	26,17
11	Peran Peradilan yang Independen	100	100	100	75.00	100	12.50	75,00	50,00

Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2014 dan 2015

Nomor	Indikator	2015	2016
Kebebasan Sipil			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100	100
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	6,25	100
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	66,67	83,33
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100	100
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	73,91	73,91
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100	100
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	80,00	80,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	83,33	66,67
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	100	100
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	100	100

Tabel 2 : Lanjutan

Nomor	Indikator	2015	2016
Hak-Hak Politik			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	100	100
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	74,55	74,55
14	Voters turnout	68,31	68,31
15	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	46,67	50,00
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0	0
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100	100
Lembaga Demokrasi			
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100	100
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	100	100
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	28	31,10
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	0	0
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3,57	7,14



Tabel 2 : Lanjutan

Nomor	Indikator	2015	2016
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100	100
24	% perempuan pengurus partai politik	60,58	81,36
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN (indikator baru)	63,16	47,37
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah (indikator baru)	16,67	8,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	50	100
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100	0

Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2015-2016

Provinsi	IDI 2015			IDI 2016		
	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Aceh	67,78	74,81	63,98	72,48	63,94	60,33
Sumatera Utara	69,01	82,02	62,17	67,37	62,29	56,13
Sumatera Barat	67,46	52,99	69,77	54,41	54,33	58,82
Riau	65,83	66,46	66,61	71,89	77,98	62,34
Jambi	70,68	75,89	62,12	68,89	65,63	54,58
Sumatera Selatan	79,81	96,06	78,79	80,95	81,94	66,53
Bengkulu	73,60	78,50	68,45	74,23	63,84	77,01
Lampung	65,95	71,99	63,19	61,00	59,32	64,31
Kep. Bangka Belitung	72,31	81,25	66,95	83,00	81,09	80,20
Kepulauan Riau	70,26	80,16	65,01	72,84	71,28	59,48
DKI Jakarta	85,32	89,64	83,19	70,85	67,54	63,19
Jawa Barat	73,04	79,10	81,89	66,82	72,34	49,79

Tabel 3. Lanjutan

Provinsi	IDI 2015			IDI 2016		
	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Jawa Tengah	69,75	79,44	67,28	66,71	67,24	66,69
D.I.Yogyakarta	83,19	90,41	77,98	85,58	81,59	86,37
Jawa Timur	76,90	85,26	67,44	72,24	76,49	63,63
Banten	68,46	74,28	63,72	71,36	68,30	60,99
Bali	79,83	94,42	77,42	78,95	69,60	71,18
Nusa Tenggara Barat	65,08	51,59	61,11	65,41	62,08	71,13
Nusa Tenggara Timur	78,47	93,19	71,69	82,49	81,68	66,46
Kalimantan Barat	76,40	96,81	65,57	75,28	75,70	64,54
Kalimantan Tengah	73,46	85,07	68,31	74,77	70,66	68,43
Kalimantan Selatan	74,76	54,15	85,77	73,43	83,58	72,89
Kalimantan Timur	81,24	93,07	82,74	73,64	78,35	60,36

Tabel 3. Lanjutan

Provinsi	IDI 2014				IDI 2015			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Kalimantan Utara	80,16	98,10	83,65	52,05	76,98	100,00	66,64	64,48
Sulawesi Utara	79,40	86,71	77,92	72,53	76,34	96,31	70,42	60,62
Sulawesi Tengah	76,67	94,60	68,85	66,53	72,20	80,39	67,89	68,76
Sulawesi Selatan	67,90	69,38	64,25	71,84	68,53	75,54	61,51	70,86
Sulawesi Tenggara	69,44	91,14	56,95	61,99	71,13	88,07	55,51	74,66
Gorontalo	76,77	81,35	69,97	81,81	77,48	82,35	75,54	74,42
Sulawesi Barat	68,25	81,88	61,16	62,37	72,37	82,89	69,02	64,47
Maluku	65,90	76,04	63,20	57,43	78,20	87,17	76,18	70,13
Maluku Utara	61,52	73,53	61,00	47,25	73,27	92,27	61,79	67,59
Papua Barat	59,97	92,33	39,48	51,81	60,35	93,67	38,05	53,85
Papua	57,55	82,72	41,81	50,87	61,02	92,15	41,13	53,45
INDONESIA	72,82	80,30	70,63	66,87	70,09	76,45	70,11	62,05

<https://sumut.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp. : (061) 8452343, Fax. : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : bps1200@bps.go.id

ISBN 978-602-331-053-1



9 786023 310531 >